

Transkrip Rekaman Podcast RUU

Episode : Mengapa Perlu Advokasi Kebijakan Seni?

Pembicara : Cholil Mahmud, Retha Dungga

Tanggal rekam : 30 Juni 2020

Pentranskrip : Dinita Amanda



Timestamp	Transkrip
00:00-00:30	<p>Naomi: Kalau kita ngobrolin di masa pandemi ini ya, untuk Mbak Retha mungkin seperti kita lihat seni itu kan makin banyak kita konsumsi. Kaya misalnya 3 bulan kebelakang ini entah ada berapa ratus, oh lebay ya.. berapa puluh yang kita tonton dan juga sekian ratus lagu yang kita putar lewat macam-macam perform live streaming. Sebenarnya apa sih manfaat seni selain sebagai hiburan?</p>
1:55-3:29	<p>Retha: Jadi kita mulai ya, dari sisi senimannya karya seni itu kan biasanya jadi sarana ekspresi diri ya, jadi segala macam emosi pengalaman, harapan, mimpi, itu bisa disampaikan lewat beragam bentuk seni. Buat masyarakat seperti Naomi bilang, selain menikmati seni sebagai hiburan, banyak banget manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, bisa memberi dampak sosial positif, contohnya Sanggar Anak Akar itu merangkul anak-anak yang kebetulan hidup dijalan dan mengajak mereka berkesenian.</p> <p>Seni juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi, seperti kita lihat di festival di Ubud atau festival yang merayakan adat seperti di Pasa Harau di Sumatera Barat, di Tour De Singkarak di Sumatera Utara. Seni juga dipakai untuk kampanye beragam isu yang efektif, mulai dari antikorupsi, hak asasi manusia, sampai lingkungan. Secara medis, seni juga sering dipakai terapi.</p> <p>Nah, kalau misalnya kita terlibat di seni kita bisa melatih diri agar lebih percaya diri, melatih imajinasi, belajar empati, kolaborasi, konsentrasi, melatih keahlian komunikasi publik, reduksi stres terutama di masa-masa pandemi sekarang. Karena seni itu bisa meningkatkan motivasi bisa jadi sarana ekspresi emosional dan refleksi, selain itu juga bisa bikin kita bugar, meningkatkan daya ingat, juga pastinya kita punya apresiasi lebih buat dunia seni budaya. Itu sih pentingnya.</p>
3:29-3:35	<p>Naomi: Banyak banget dampak positifnya ya seni itu untuk masyarakat, tapi hubungannya dengan kebijakan tuh gimana nih Mbak Retha?</p>
3:35-6:48	<p>Retha: Hubungannya gini. Tahun 2018, Koalisi Seni sempat mengumpulkan 12 cerita tentang dampak seni. Jadi kita terbitkan sebagai buku Dampak Seni di Masyarakat tahun lalu. Nah, supaya seni dapat menimbulkan</p>

	<p>dampak positif lebih luas lagi kita perlu kebijakan untuk mendukung. Bukan cuma kebijakan pemerintah pusat, tapi juga perusahaan swasta dan lembaga masyarakat sipil. Misalnya, apakah kebebasan berekspresi seniman dijamin oleh pemerintah sehingga seniman bisa menggunakan kreativitasnya dalam karya. Mungkin kita masih ingat awal tahun 2019 ada RUU Permusikan draftnya waktu itu ada pasal yang mengganggu kreativitas bermusik akhirnya ditolak publik. Nah, kehebohan itu kan bikin DPR menarik beberapa RUU Permusikan tuh!</p> <p>Nah, kebijakan di dalam seni sebetulnya bukan untuk mengatur dari segi artistiknya, tapi justru untuk melindungi kebebasan ekspresi artistik-artistik itu. Dan memastikannya bertumbuh kembang dengan baik. Saya kira begitu.</p> <p>Nah, sebenarnya seni itu gimana ya, kalau kita dudukan dalam kebijakan publik dia itu jatuhnya jadi pendidikan. jadi ada eksternal positif ya dimana keberadaanya sering kali tidak diperhitungkan manfaat sosial atau dampak positif yang muncul. Padahal dia dirasakan oleh setiap orang termasuk orang-orang yang menentang seni.</p> <p>Tentu kita mau masyarakat luas bisa terpapar ya keanekaragaman seni budaya. Karena dia akan membantu kita masyarakat Indonesia ini beragam banget dan membantu kita mengasah empati. Misalnya, saya tuh selalu terbawa emosi misalnya kalo denger lagu Hena Masa Waya Glenn Fredly tuh sering menyanyi lagu itu, lagu dari Maluku. Alunan nadanya tuh membayangkan nuansa kebudayaan Maluku, sementara konteks makna dibalik liriknya yang terdengar sangat indah gitu ya, bikin kita sadar setelah kita kulik lebih jauh, ternyata ada pergolakan identitas politik yang sangat besar. Dari situ kita belajar bisa berempati gitu, karena kita jadi bisa ngerasain semangat perjuangan rakyat Maluku.</p> <p>Nah sekarang ketidakpahaman orang tentang pentingnya seni juga lemahnya penghargaan profesi seni, misalnya kita liat ya di masa pandemi ini kan salah satu masalah lain dari ekosistem seni juga gitu. Kita ga pernah yakin kan kalo kita mau ambil karir jalur seni misalnya. Banyak yang ngeh, kalo mau karir bidang seni ya jadi seniman gitu kan padahal di balik sebuah karya baik itu lukisan, film, lagu, ada sistem pendukungnya.</p> <p>Nah, mulai dari misalnya kalau dilihat di rantainya itu ya, reaksi, distribusi, pengarsipan, apresiasi dan juga pendidikan semua tuh ada yang melakukan. Misalnya, karya udah dibuat kemudian harus didistribusikan, kemudian karya masuk ruang pameran dia butuh kurator, lalu diarsipkan, nah di sini peran arsiparis penting. Kemudian di bagian apresiasi perlu kritikus atau pengulas, di bagian pendidikan baik yang dasar maupun profesi butuh yang memumpuni seni. Jadi sepertinya banyak banget hal-hal yang membantu di seni. Itu orang sering luput ya, karena mungkin ...</p>
7:44	<p>Naomi: Kadang orang berpikir, seni itu tidak seperti yang Mba Retha bicarakan begitu. Banyak seni itu adalah musik aja, gitu kan. hanya satu doang gitu, hanya terpaku sama mereka</p>

7:44-9:48	<p>Retha: Terpaku pada apa yang terlihat, terpaku pada performernya aja. Padahal dibalik performer itu banyak pendukung. Mungkin nanti Mas Cholil bisa bercerita lebih banyak ya. Kalau ga ada <i>stage crew</i> kayak apa tu sulitnya manggung misalnya.</p> <p>Nah, yang kedua misalnya faktor-faktor fisik nih di dalam seni, disini kita ngomong penunjang, fasilitas, dan alat. Misalnya, gedung pertunjukan yang layak untuk teater sedikit banget. Maksudnya gedung teater yang bener-bener memperhatikan tata lampu dan akustik ruangan, misalnya ya, dan juga tempat duduk penonton pertunjukannya, jadi dia nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jauh atau nggak terlalu dekat sama penonton yang ada disekitar kita. Terus tangga, ini simple nih. Tangga yang tidak membahayakan kalau kita lewati dalam keadaan gelap. Kan kalo sedang pertunjukan gelap gitu yah, buat kita kepeleset di dalem nggak lucu banget gitu maunya kita nonton malah jadi susah. Nah, gedung pertunjukan buat film itu sebenarnya banyak yang bagus tapi itu juga di kota-kota besar, masih belum sebanding juga sebetulnya dengan keseluruhan populasi penduduk Indonesia.</p> <p>Buat musik misalnya, Mas Cholil nanti juga bisa cerita tentang ini, tempat pertunjukan musik tuh masih banyak yang pakai sarana olahraga, gedung-gedung olahraga, lapangan parkir, ini kan secara biaya produksi besar karena harus banyak yang ditambahi, selain bikin panggungnya aman ya, kita harus mikirin pembatas buat crowd management, mikirin kios makanan dan minuman, toilet, ruang istirahat musisi dan crew, terus transportasi dan kendaraan pengangkut yang mau ditaruh dimana, yang gitu gitu. Tidak semudah apa ya? Tahu-tahu langsung muncul aja gitu jeng-jeng di tengah lapangan ada panggung gitu, biayanya besar sekali untuk membuatnya.</p>
9:48-10:00	<p>Naomi: Justru disitu seninya nggak sih? Tapi biayanya banyak ya? Tapi sejauh ini kebijakan yang sudah mendukung supaya kasih dampak positif yang mba bilang itu apa aja mba? Kebijakan-kebijakannya.</p>

10:00-11:47	<p>Retha: Kebijakan yang sudah ada salah satunya yang sering kita banyak omongin adalah adanya Undang Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang No.5 Tahun 2017, Dia undang-undang yang menempatkan pemerintah menjadi fasilitator bukan tukang ngatur-ngatur ekspresi seni. Jadi si UU ini yang mengatur bahwa usaha-usaha memajukan kebudayaan dimana seni adalah salah satu didalamnya, ini merupakan rangkaian proses yang terkait dan tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti yang saya bilang ada perlindungan, perkembangan, kemudian pemanfaatan, dia mikirin juga si manusia-manusianya tadi tuh SDM kebudayaannya juga dipikirkan gitu didalam undang-undang ini. Jadi misalnya perlindungan itu adanya inventarisasi, ada pengamanan, ada pemeliharaan, ada publikasi.</p>
-------------	--

	<p>Pengembangan itu ada penyebarluasan, pengkajian, pengayaan tentang keberagaman. Pemanfaatan itu misalnya, memikirkan gimana supaya kebudayaan ini bisa berperan dan berpengaruh di level internasional. Pembinaan tentu kita ngomongin tentang peningkatan mutu SDM ya, dan butuh tata kelolanya juga. Ada beberapa undang-undang lain yang berhubungan dengan seni misalnya undang-undang film, ada juga undang-undang hak cipta, tapi nanti kita bisa bicara tentang itu.</p>
11:47-11:57	<p>Naomi: Kalau Mas Cholil, sebagai seniman musisi udah pernah ga Mas Khalil melihat kebijakan yang berpihak pada profesi Mas Kholil ini?</p>
11:57-13:38	<p>Cholil: Kalau berpihak kepada.. Saya pekerjaannya musisi ya, pemain musik. Undang Undang Pemajuan Kebudayaan itu punya karakter yang berbeda dari apa ya.. misalnya contohnya kemarin kita musisi banyak menolak itu, rancangan UU Permusikan. Itu karakternya beda banget, karena Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu dia tau apa kebutuhan musisi, dan pemerintah ini mengatur bagaimana dia bisa memaksimalkan musisi atau seniman dan bagaimana kebudayaan itu bisa tumbuh, dan tidak dikekang-kekang tapi dia bisa mewarnai kehidupan masyarakat.</p> <p>Sebaliknya, yang rancangan UU Permusikan di tahun 2019 waktu itu kita banyak menolak, itu karena karakternya terbalik, ini justru banyak mengatur hal-hal yang ga perlu diatur, misalnya kebebasan berekspresinya seniman, lalu musisinya harus punya sertifikasi segala macam. Kok, karakternya beda jauh dari yang seharusnya dibutuhkan oleh musisi atau seniman itu. Akhirnya banyak penolakan di RUU Permusikan, sedangkan di Undang-undang Pemajuan Kebudayaan harusnya lebih didorong lagi dan disosialisasikan kepada para seniman ataupun musisi, termasuk juga kepada pemerintah kota, kabupaten ataupun provinsi untuk menjalankan amanat dari undang-undang pemajuan kebudayaan itu sih, karena baik.</p>
13:38-13:47	<p>Naomi: Kita memang belum punya Undang-undang Permusikan, kan ya mas ya?</p>
13:47-13	<p>Cholil: Undang-undang Permusikan belum sebenarnya, jadi waktu itu keinginan..</p>
13::48-13:49	<p>Naomi: Sempat dibatalkan kan ya?</p>
13:49-15:24	<p>Cholil: Iya dibatalkan, sebenarnya rancangan UUD Permusikan ini melihat bahwa musik ini bagian jadi termasuk salah satu, mungkin fokus ya di pemerintahan Pak Jokowi di 2014-2019 selain mungkin perfilman. Perfilman udah punya undang-undang perfilman, mereka punya Badan berbagai perfilman Indonesia, mereka punya berbagai institusi gitu ya, dan di musik ini sebagai salah satu fokus juga. Mungkin mereka ingin memulai dengan mengadakan, membuat mengatur regulasi kebijakannya yaitu undang-undang permusikan.</p> <p>Tapi sayangnya sejauh dari apa yang diharapkan atau yang dibutuhkan</p>

	<p>oleh para musisi, undang-undang itu justru mengekang, mengatur dan tidak sensitif dengan perkembangan-perkembangan baru. Misanya nih digital perkembangan baru ya. Kan konsumsinya berubah dan produksinya berubah, itu ga terlihat di rancangan undang-undang itu, sehingga "kok kaya kurang bisa menyerap dan mengejar kaya jaman sekarang gitu. Nanti jangan-jangan kalo udah jadi undang-undang, nih ketinggalan jaman ya nggak kepakai juga" gitu. Jadi memang butuh, tapi kalo kita ingin tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan harus lebih menyeluruh lagi bikin naskah akademisnya. Sehingga benar-benar menangkap apa sebenarnya yang dibutuhkan musisi sekarang.</p>
15:24-15:37	<p>Naomi: Mas Cholil kan juga ikut menolak yang sempat terjadi di 2019 tentang RUU Permusikan yang sempat ada dan ditolak. Tapi bisa cerita nggak mas prosesnya seperti apa kalau itu ditolak?</p>
15:37-19:18	<p>Cholil: Prosesnya, sebenarnya ini kebetulan anggota Koalisi Seni juga dan mendapatkan akses untuk membaca draft rancangan undang-undang permusikan yang mungkin belum diplenokan tapi sudah beredar di kalangan musisi dan juga beberapa pihak, mungkin badan legislatif gitu ya. Lalu setelah membacanya kok karakternya, yang paling pertama banyak musisi yang kalau di-highlight itu adalah kebebasan berekspresi bisa sangat terkekang, lalu selain itu adalah butuhnya sertifikasi untuk seluruh musikus.</p> <p>Padahal sebenarnya kalau mungkin sertifikasi perlu, siapa aja yang perlu sertifikasi gitu ya. Lalu dari situ, kita batasi aja kalau memang perlu dan dibutuhkan, kita tidak akan memaafkan kalau butuh adanya sertifikasi tapi boleh kita adakan tapi tidak bersifat kewajiban dan akses dari sertifikasi nanti bisa ada diskriminasi. Jadi pemerintah atau regulasi itu harus bisa memastikan bahwa sertifikasi ini bukan menjadikan seorang anak mas. Karena dia layak untuk mendapatkan proyek A, proyek B. Dan sertifikasi itu bermacam-macam, ada sertifikasi untuk penyelenggaraan musik, sertifikasi untuk menerbitkan musik. Contohnya ya, sekarang kan musisi ini bisa bikin di laptop kemudian bisa menguploadnya, itu kan sudah mensosialisasikan karya mereka ya. Itu sudah kayak kita nafas aja, gampang banget! Dengan mudahnya.</p> <p>Nah dengan ketentuan rancangan undang-undang ini seperti ingin menghambat gitu, bukannya mengencourage atau membuat suasana seperti makin riuh dengan adanya banyak karya ini justru di hambat harus ada izin yang bisa mempublikasi sebuah karya adalah lembaga yang punya izin segala macem gitu. Sebenarnya untuk beberapa hal skala besar memang perlu, misalnya penyelenggaraan festival perlu izin. Yang seperti apa dulu nih kita menyelenggarakan panggung memberi izin yang kayak gimana dulu. Kalau yang besar mengundang orang banyak, perlu keselamatan, perlu berbagai macam persiapan dan infrastruktur tambahan agar penyelenggaraan bisa berjalan damai, lancar dan aman. Itu memang perlu ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi oleh <i>event organizer</i>, tapi kalau sekedar 17-an panggungnya kecil itu kan tidak</p>

	<p>perlu atau kawinan gitu yang mungkin protokol keamanannya sudah terpenuhi oleh gedung, ya dia nggak perlu ada izin itu. Nah, di rancangan undang-undang waktu itu nggak ada pembatasan ga semua memerlukan. Jadi semangatnya kok.. kalau ini sampai bergulir gitu ya undang-undangnya disetujui justru menghambat perkembangan musik, bukan justru malah seperti yang diharapkan membuat musik menjadi bergairah.</p>
19:18-19:40	BREAK
19:40-20:08	<p>Naomi: Hallo we're back, kamu masih mendengarkan podcast Ruang Usik-Usik ini adalah kerja sama Koalisi Seni dengan KBR, saya Naomi Liandra. Kita lanjut lagi, tadi kita udah ngobrol sama Mas Cholil gimana prosesnya pada saat MasCholil ikut menolak RUU Permusikan di 2 tahun yang lalu ya 2019. Nah kita kembali ke Mba Retha, Manajer dan Anggota Koalisi Seni. Sebenarnya kebijakan seperti apa yang Indonesia butuhkan untuk kebutuhan seni?</p>
20:08-25:35	<p>Retha: Kebijakan yang dibutuhkan ya? Tadi kan kita sempet ngobrol posisi pemerintah di undang-undang pemajuan kebudayaan ya. Dimana ia posisi pemerintah adalah fasilitator yang mana ia memastikan ada koneksi antara cluster-cluster pegiat kebudayaan dan mendukung supaya kegiatan para pegiat ini berkembang pesat, baik ditingkat nasional maupun internasional. Jadi posisinya itu bukan konten, kira-kira begitu ya. Tapi memastikan supaya karya-karyanya banyak diproduksi, riuh, banyak pembicaraan yang terjadi di antar kegiatannya, diantara penontonnya, di para pengulasnya. Memastikan bahwa sistem pendukungnya juga di sehatkan dan dimajukan dengan baik.</p> <p>Sekarang ngomongin tentang si pemerintah, saya dapet cerita anekdot dari anggota Koalisi Seni juga, dia aktif di Badan Perfilman Indonesia. Jadi dia bilang, "Ada gestur bagus dari mantan gubernur DKI, dia kasih 5 persen pajak ke produser film." Sementara kalau di liat di ekosistem film itu masalahnya ada di distribusi bukan produksi. Film Indonesia sebelum masa pandemi itu bagus banget rate produksinya. Nah setelah di produksi film-film ini butuh layar, butuh penonton buat tempatnya ada di gedung bioskop. Kalau misalnya insentif itu dikasih ke pemilik gedung bioskop, mereka akan jauh pilih memutar film Indonesia daripada Hollywood misalnya. Ini bikin kebijakannya jauh lebih tepat.</p> <p>Kemudian ada lagi cerita dari monev UU Pemajuan Kebudayaan tahun lalu. Jadi UU pemajuan kebudayaan itu kan diketok di 2017, tahun kemarin 2 tahun setelah disahkan kita bikin monitor evaluasi sudah sejauh mana pelaksanaannya. Kemudian salah satu temuannya adalah Dinas Kebudayaan di berbagai Pemda itu suka nggak punya power. Karena mereka eksistensinya itu tempel ke dinas lain, misal Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, bahkan Dinas Telekomunikasi. Tentunya budgetnya kalah prioritas dan keleluasaan alokasi dana ini jadi terbatas, kreativitas pun hampir nggak ada. Jadi kalau tahun kemarin dan sebelumnya bikin festival, tentu tahun ini programnya festival lagi. Jadi mengembangkan program bareng senimannya sendiri secara partisipatoris itu hampir</p>

	<p>nggak terbayang bahwa itu bisa dilakukan. Jadi disini juga ada masalah kompetensi sumber daya manusia ya, dalam menangani sektor seni budaya.</p> <p>Nah, kalau kita lihat di masa pandemi, bentul kita rasakan, kita lihat seni jadi konsumsi karena orang butuh hiburan. Tapi apa sebenarnya betul ini bikin konsumen dan perusahaan lebih peduli nasib pekerja kreatif, nasib seniman yang memproduksi karya-karya ini. Kan antara iya dan enggak ya, kita lihat pemerintah kasih bantuan untuk pekerja seni dan kreatif yang terdampak, tapi itu mengikuti skema yang udah ada. Dan karena judulnya relief (bantuan), jadi sifatnya temporer untuk mengatasi emergency, mereka ga merilis dibikin untuk sektor seni supaya lebih berkelanjutan lagi. Jadi dari segi impact, hanya menyentuh fragment-fragment aja dari penggiat seni secara keseluruhan.</p> <p>Kepikirannya gini, kenapa nggak fokus digital marketplace buat seni sih yang sudah ada? Atau misalnya mau bikin sendiri yang baru yang lengkap dengan support systemnya. Kan ada temen-temen kita yang teriak “susah nih, konversi digital nggak semua bentuk seni itu cocok loh di konversi digital. Terus kemudian yang udah pindah pun belum tentu dapat audiens kan. Nah, kalau pemerintah mau kreatif misalnya sewa atau mengalihkan ruang publik, atau ruang-ruang <i>government owned</i> jadi tempat produksi, kemudian disambungkan lagi ke market ini sesuatu yang mungkin saja terjadi. Jadi temen-temen yang punya bakat fotografi, kelompok teater, simfoni, pematung dan pelukis semua bisa showcase karya dengan baik dibantu dengan dipertemukan audiensnya yang lebih luas. Lintas provinsi, lintas negara, atau misal juga sediakan dana khusus untuk komunitas, untuk masyarakat semakin terhubung.</p> <p>Karena ruang-ruang kolaborasi antar komunitas ini sudah terbuka dan terjalin, karena komunitas biasanya cepet banget ya. Mereka terdepan bikin inovasi survive di masa sulit misalnya, kalau koneksi internet susah ya udah bikin sendiri aja dan udah terjadi tuh di Ciptagelar, ada anggota Koalisi Seni juga yang jadi fasilitator disana dan luar biasa sih jadi mereka nggak tergantung dengan kita terus cari-cari brand dulu buat online gitu ya, mereka bikin sendiri, keren banget sih!</p>
25:35-26:00	<p>Naomi: Kalau kita berkaca nih, kan negara-negara lain yang kesenian juga berkembang pesat, tapi kita juga bukan mau compare gitu ya. Sebenarnya kita kan pengen kesenian di negara ini maju, kebijakan apa sih yang mungkin mereka punya yang mungkin bisa jadi semacam contoh atau jadi sampel yang kita lihat dari negara-negara lain?</p>
26:00-30:15	<p>Retha: Di Amerika itu punya NEA, National Endowment for The Arts, ini lembaga pemerintah didirikan tahun 1965 pada masa Presiden Lyndon B. Johnson yang di masa pemerintahannya bikin National Endowment for the Humanity buat mendukung inisiatif di bidang humaniora. Nah, NEA ini waktu dibuat tugasnya mendukung supaya masyarakat Amerika itu punya kualitas hidup yang baik lewat seni. jadi sisinya itu melihat bahwa seni itu</p>

	<p>meningkatkan kualitas hidup masyarakat jadi mereka mau memutus tidak apa ya.. memutus <i>inequality</i> di bidang seni dan mendorong kepemimpinan baik di bidang seni. Pendekatan NEA dia menyediakan grants buat kelompok seni bikin karya, pengarsipan, meneliti, fellowship. Misalnya yang ngetop banget di Broadway di tahun kemarin, 2 tahun lalu. Hamilton, musical Hamilton itu awalnya mereka bikin workshop untuk mengembangkan konsep Hamilton itu didukung oleh NEA, dapat grand dari NEA. Bukan tanpa kontroversi juga, meskipun budgetnya nggak besar biasanya yang konservatif ini menganggap pembiayaan seni ini cost bukan investasi. jadi justru kebalikannya dengan mimpi gedonya Presiden Lyndon B. Johnson ini. Di Amerika sudah terjadi berkali-kali usaha membubarkan dan menghentikan pembiayaan oleh NEA, yang terbaru di masanya Trump sekarang itu bahkan mau bener-bener di potong. Jadi ini nyambung ke soal pendanaan ya, keberlanjutan itu kan problem besar.</p> <p>Selama ini kalau kita memandang pentingnya kebudayaan, pentingnya seni gitu ya, yang kebayang itu kan preservation gitu. Kita harus menjaga seni seolah-olah seni hidupnya di masa lampau, padahal nggak. Yang penting itu sebetulnya supaya seni itu berlanjut ke masa depan. Nah padahal apa namanya, menjaga yang penting di masa depan ini sebetulnya ngomong tentang sumber daya.</p> <p>Nah, sumber daya di tingkat lokal sebenarnya besar dan perlu dimobilisasi. Kita tahu nggak banyak perusahaan atau swasta yang tertarik membangun seni, padahal Kemenkeu udah baik banget, mereka bikin instrumen-instrumen untuk support seni ya. Misalnya ada insentif pajak, emang sih insentifnya nggak.. ada yang bilang "ini kurang besar" gitu. Dia hanya 25% dari besarnya sumbangan, dan sumbangannya juga nggak boleh lebih dari 5% netto, ini diatur di PP 2003 tahun 2010 tentang Sumbangan Penelitian.</p> <p>Nah, di sini ada kesempatan advokasi jadinya, pertama supaya pemerintah naikin insentifnya, para pihak yang bergerak di seni budaya juga lebih aktif menyuarakan "ada loh ini insentif, ayo dipake!". Tapi kalau insentifnya terlalu kecil ayo kita suarain. Jadi perlu banyak lagi juga suara bilang ke Kemenkeu bahwa support mereka tuh "Oke niatnya baik, tapi ayo dong di tambahin lagi" gitu.</p> <p>Nah, di masa pandemi ini juga Kemenkeu bikin PMK yang ngasih keringanan pajak ya buat industri musik, musik tradisi, pertunjukan film, musik pertunjukan, ini kita lihat sebagai gestur baik. Tapi kedepannya menurut saya, jika ada komitmen yang lebih besar untuk sektor seni ini bisa diwujudkan dengan subsidi, penggunaan ruang publik misalnya buat pertunjukan seni. Jadi ada support lebih besar diberikan kepada tempat-tempat yang memberlakukan protokol kesehatan, ya misalnya seperti itu.</p>
30:15-30:28	<p>Naomi: Kalau Mas Cholil, sebenarnya apa yang bisa dibbilang pelajaran yang paling menarik untuk Mas Cholil dari proses advokasi RUU Permusikan waktu lalu itu?</p>

30:28-36:00

Cholil:

RUU Permusikan itu sebenarnya buat kami sendiri dan banyak musisi ya, itu pertama kali terlibat aktif di dalam suatu kampanye untuk kalau saat ini menggagalkan rancangan undang-undangan yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi musisi. Nah itu kita pertama kali gitu yaa. Jadi setelah saya dapat draft nya dari KSI lalu juga ada temen dekat di Koalisi Seni juga yang bantu untuk menganalisis apa saja pasal-pasal yang berbahaya, lalu kita rapat berdasarkan ini saya lihat dulu, kira-kira orang ini pandangannya terhadap rancangannya undang-undang yang beredar itu gimana? Jadi ketika ada penolakan saya hubungi gimana kalau kita melakukan sesuatu untuk bersama-sama membahas ini, dan kalau memang dirasa perlu kita membuat suatu koalisi.

Dari situ saya ga cari orang yang nggak paham karena pasti pandangannya sudah jelas dan pasti itu akan membuat perdebatan yang saya rasa ga perlu diperlukan untuk saat itu ya, membuat situasi jadi perdebatan makin lama, jadi makin lama lagi ngumpulnya untuk bikin aksi. Akhirnya setelah dapet yang kira-kira sejenis visinya lalu bikin grup whatsapp, lalu ngebahas kira-kira pasal-pasal mana saja yang berbahaya lalu kita dibantu oleh Hafez dari Koalisi Seni, kita bikin daftar isian masalah, kita bikin prosedur yang dilakukan DPR jika ada masyarakat yang ingin memberikan pandangan terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibuat. Jadi buat list masalah, dari 54 pasal yang menurut kami itu kurang tepat atau ga perlu, atau menghambat itu ada 49 pasal. Jadi 5 pasal yang tidak kami sentu itu pasal-pasal yang normatif aja sebenarnya kaya undang-undang ini berlaku. Jadi hampir sebagian besar roh dari rancangan undang-undang itu kurang tepat atau bisa membahayakan daripada justru menghidupkan proses berkesenian dari musisi itu.

Dari situ kita kampanye bikin petisi, bikin isian daftar masalah dan berikan ke DPR. Ada juga dateng itu ada konfrensi pers antara musisi yang menolak, musisi yang setuju, yang revisi lalu ada juga pihak dari badan legislasi. Itu kita kampanye kalo nggak salah seingat saya kampanye lainnya itu petisi diadakan oleh Danilla, yang menginisiasi petisinya Danilla, mungkin mencapai ratusan ribu penandatanganan petisi lalu juga kita akhirnya setelah diribut-ribut sampai ke media massa nasional, lalu pihak BALEG mengundang kami untuk mendengar masukan.

Lalu kami berikan bahwa sebenarnya secara keseluruhan rancangan undang-undang ini bukan yang kita butuhkan sekarang. Jika memang undang-undang permusikan dibutuhkan, kita mendengar pelan-pelan lebih banyak masukan dan dimulai dari naskah akademik yang kuat. Jadi dari situ kita punya fondasi yang kuat untuk menyusun UU musik yang memang tepat sasaran. Terutama soal yang paling banyak disorot orang adalah kita perlu ada tata kelola di industri musik, nah itu nggak tergambar di undang-undang itu. Jadi ya pengennya apa tapi dapetnya apa. Jadi kurang nyambung. Nggak bisa dibilang koalisi yang kita bentuk itu nggak membutuhkan undang-undang musik gitu. Tapi, undang-undang seperti apa sebenarnya dibutuhkan. Nah itu perlu mendengar masukan dari berbagai pihak.

	<p>Jadi pelajaran berharganya adalah, kita kalau melihat sepintas ini pertama kali.. nggak tau yah mungkin karena yang terlibat itu musisi-musisi, jadi dukungan publik juga kuat. Karena dukungan publik kuat akhirnya DPR gerah juga kali ya, dan ngedrop rancangan undang-undang permusikan itu dari Program Legislatif Nasional, kalau nggak salah ya. Jadi ya kita cukup senang dan nggak menutup kemungkinan diajak untuk konsultasi kebijakan musik yang baru itu kita sama sekali nggak anti sebenarnya.</p>
36:00-36:10	<p>Naomi: Nah, kalau dari Mas Cholil sendiri sebagai seniman gitu ya, yang Mas Cholil inginkan kebijakan seni yang ada di Indonesia itu seperti apa mas?</p>
36:10-40:29	<p>Cholil: Kebijakan seni itu yang sebenarnya mendukung musisi untuk berkarya lalu dia bisa.. ya paling tidak, tidak terlambat mengatur hal-hal yang berkembang sekarang gitu ya. Biasanya hukum itu terlambat mencerpap keadaan karena pasti keadaan datang dulu, baru kita membaca situasi baru dibuat regulatifnya, paling nggak nggak terlambat jauh lah. Lalu yang paling utama buat masyarakatnya sendiri itu sebelum sampai undang-undang gitu ya perlu ada penelitian seperti yang tadi Retha sudah bilang, reaktif masyarakat bahwa seni itu adalah hiburan, tapi sebenarnya banyak yang dihasilkan dari seni itu yang nggak bisa, nggak orang rasakan, yang nggak orang tahu.</p> <p>Nah itu riset-riset yang bisa mengatur dampak dari, bukan hanya ekonomi ya, dampak sosial, dampak cultural, dampak psikologis yang dihasilkan oleh seni itu bisa terukur dan itu bisa menjadi bahan betapa pentingnya itu seni dan dari situ masyarakat bisa lebih memahami dan bisa menggunakan seni itu dan mengerti bahwa kalau kita meremehkan seni ini banyak hal yang sebenarnya bisa hilang dari unsur-unsur kehidupan kita. Jadi dari situ apresiasinya tumbuh, kalau dari masyarakat apresiasinya tumbuh itu akan membuat ekosistemnya jadi lebih baik lagi.</p> <p>Kalau tadi Retha menyinggung di Amerika ada NEA yang memberi donor segala macam itu kan karena pemerintah punya visi kalau "Ya, seni itu berguna buat meningkatkan tingkat bahagia masyarakatnya, negaranya, cara pandang warga negaranya terhadap berbagai hal, itu dia juga bisa menumbuhkan empati juga. Mungkin seni bisa buat orang punya lebih toleran terhadap orang lain, karena nggak menganggap perspektif orang lain itu mungkin benar juga, perspektif kami benar juga". Jadi dengan banyak mengonsumsi seni kita jadi punya berbagai pandangan. Itu kan jadinya penting bagi masyarakat ini untuk lebih toleran satu sama lain. Itu juga kan harus bisa jadi visi dari pemerintah sehingga dukungan terhadap seni kuat juga.</p> <p>Ketika masyarakat sudah punya pemahaman yang sama, mereka jadi merasa perlu untuk memberikan sumbangan agar kegiatan-kegiatan berkesenian itu tumbuh, karena dia merasakan manfaatnya gitu ya. Dan dari kegiatan berkesenian tumbuh itu, kalau misalnya NEA memberikan dana ini lembaga-lembaga sosial atau CSR dari perusahaan-perusahaan</p>

	<p>itu juga banyak banget yang memberikan dana untuk kesenian dibantu juga dengan ada kebijakan intensif pajak itu yang cukup bisa membantu mereka untuk memotong, jadi terasa gitu, nggak kekecilan juga perhitungan pajaknya.</p> <p>Jadi dari situ kan tumbuh, pemerintah memberikan kebijakan dan mereka yang punya dana lebih merasa perlu seni itu harus tumbuh dia juga mau menyumbangkan uang dan masyarakat yang menonton juga mau memberikan uang, lalu si musisinya itu atau senimannya itu bisa bebas berkreasi dan menemukan mencari penemuan-penemuan baru dalam seni dan semoga itu bisa membuat semuanya berjalan untuk lebih maju kesenian dan kebudayaannya. Itu sih sebenarnya.</p>
40:29-40:40	<p>Naomi: Mba Retha, kira-kira siapa saja yang dapat mendorong advokasi ini? Apakah cuma seniman seperti Mas Cholil aja kah, gimana tuh Mba Retha?</p>
40:40-44:47	<p>Retha: Aku mau nambahin satu lagi tentang NEA, NEA itu kan fokus untuk memberikan grand buat seni di Amerika, Indonesia tuh inisiatifnya serupa sebetulnya juga sedang dijalankan. Namanya Dana Perwalian Kebudayaan, ini juga dimana dilandaskan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tadi saya lupa cerita. Si dana abadi ini awalnya sama Presiden Jokowi dijanjikan 5 triliun dengan tarik-ulur tarik-ulur, antara Kemendikbud dan Kemenkeu akhirnya dapet nih angkanya 1 triliun ini sudah dianggarkan di APBN 2020 saat ini sedang diproses, diputar supaya nanti di 2021 bisa mulai dimanfaatkan oleh masyarakat seni. Yang mengelola Dirjen Kebudayaan melibatkan masukan dan pengawasan dari seni budaya. Ini salah satu hal yang positif banget karena telah menjadi salah satu cita-cita besar Koalisi Seni tentunya, karena kita melihat.. Mas Cholil tadi cerita sistem pendanaan seni di Indonesia ini masih belum terlalu baik, jadi adanya dana perwalian ini adalah kabar yang sangat menggembirakan.</p> <p>Nah, kembali lagi ke pertanyaan Naomi, jadi sebetulnya kalau mau membantu advokasi gimana sih? Apakah hanya seniman saja? Saya akan bilang nggak. Advokasi seni itu tidak hanya yang terlibat seniman justru kita perlu banget temen-temen yang latar belakangnya hukum, ekonomi, hubungan internasional, buat bantuin kita buat mengedepankan pentingnya seni ke pemerintah. Karena pemerintah ngobrolnya juga ada bahasa sendiri ya, bahasa yang lensanya ekonomi, bahasa yang lensanya politik banget gitu misalnya. Padahal mereka yang pegang powernya, kita butuh nih temen-temen bantuin, kita juga butuh peneliti-peneliti, temen-temen yang doyan banget meneliti bidang yang kuantitatif gitu, hak, data dan analitik. Wah dengan senang hati kalau mau bantuin. Karena data-data inilah yang bikin inisiatif advokasi jadi lebih bumi. Membantu juga publik untuk lebih mengerti, sebetulnya problem di ekosistem seni itu seperti apa ya? Dan government bisa kasih apa? Karena government kan biasanya mau yang praktis "Oke, lu maunya apa? Lo butuhnya apa? Berapa banyak, berapa besar? Kalau nasional berarti</p>

	<p>levelnya berapa?" Jadi obrolannya sudah jadi kuantitatif, gitu.</p> <p>Tapi juga bisa sih kalau teman-teman adanya yang tertarik dukung untuk jadi anggota Koalisi, seniman atau bukan bisa menjadi anggota, selama peduli sama ekosistem seni dan siap berdaya. Misal mau berbagi pengetahuan atau berjejaring, mau support donasi juga oke. Infonya nanti bisa dilihat website Koalisi Seni, koalisiseni.or.id atau di instagram @koalisiseni.</p> <p>Oiya terus kalau misalnya lagi ada kontroversi misalnya tadi tuh Cholil cerita tentang petisi yang digagas Danila, bisa banget bantu tandatangani petisinya ke jaringan yang lebih luas lagi. Jadi bantu kita menyuarakan penolakan-penolakan atau dukungan-dukungan. Kira-kira begitu.</p>
44:47-44:49	<p>Naomi: Kalau dari Mas Cholil apa nih Mas yang ingin Mas sampaikan buat yang dengerin podcast ini, yang bisa dibilang ikutan membantu lah, saya dan juga temen-temen yang bisa membantu di podcast ini?</p>
44:49-46:43	<p>Cholil: Sebenarnya masyarakat perlu memahami isu yang sedang berkembang tentang kenapa ada RUU Permusikan, apa manfaatnya misalnya dalam konteks itu saja ya. Lalu selanjutnya mengambil sikap saja sih untuk mendukung atau menolak. Ya gitu gitu itu penting disuarakan jadi kita tahu sebenarnya.</p> <p>Jadi masyarakat didudukkan suatu kebijakan, kebijakan ini dikeluarkan karena apa, lalu dari masyarakat itu punya pandangan bahwa ini kebijakan itu tepat atau tidak tepat buat suat.. misalnya kalau di musik bisa jadi berkembang dengan adanya kebijakan itu. Jika mendukung silahkan didukung, jika menolak undang-undang itu juga mengutarakan penolakannya itu dengan berbagai argumen.</p> <p>Nah dari situ kita tahu sebenarnya dukungan publik kuat terhadap undang-undang itu dan publik merasakan manfaatnya lebih banyak atau lebih buruk dari itu. Jadi mengerti masalah dan ikut jadi kalau ada petisi itu tanda tangan, kalau ada hiring atau konferensi pers ikut menyimak. itu kayaknya sangat membantu proses termasuk demokrasi pembuatan kebijakan, gitu.</p>
46:43-47:00	<p>Naomi: Jadi ternyata di balik karya seni juga ada dampak seni yang luas memang banyak banget ternyata harus ada kebijakan yang mendukung. Dari obrolan singkatan RUU ini Ruang Usik-usik ini, kita jadi tahu nih kebijakan seni perlu di advokasi.</p>